

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah biasanya diterapkan di negara-negara yang demokratis dan erentuk serikat dan kesatuan. Otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan. (Ahid, 2014).

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun 1999 yang didahului krisis ekonomi sekitar tahun 1997. Latar belakang ekonomi daerah timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanaka secara sentralistik. Indonseia mulai melaksanakan system otonomi daerah sejak masa reformasi berlangsung yaitu tahun 1999 melalui undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2004 UU No.22 tahun 1999 dianggap todak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan UU No.32 tahun 2004. Sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kai dengan UU No.12 tahun 2008. Sejalan dengan undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan

bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif didalam pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan daerahnya masing-masing. (Kabus, 2012). Kebijakan otonomi daerah dalam realisasinya masih banyak persoalan dan kendala implementasi, yang disebabkan oleh Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas, aturan pelaksanaannya yang selalu berubah serta kepentingan politik lebih dominan dari pada kepentingan ekonomi atau lainnya. (Nanang, 2008). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai menyelenggarakan pemerintahnya sehingga tercipta tata Kelola pemerintah yang baik serta adanya evaluasi yang berskala atas capaian daerah dalam kurun waktu tertentu (Sumarjo, 2010) dan merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Tujuan sistem pemerintah adalah yang *pertama*, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, *kedua*, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. *Ketiga*, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*. *Keempat*. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan untuk kolektif yang rasional (Mardiasmo, 2004).

Menurut Bastian (2010) kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam penelitian Azhar (2008) kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2007). Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nasution, 2011), *Intergovernmental revenue* (Sesotyaningtyas, 2012) ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* (Sumarjo, 2010) bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Nasution 2011) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian (Sumarjo, 2010) studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan hasil bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah *leverage*, dan *Intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Hendro Sumarjo menghasilkan pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, *leverage*, dan *Intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Kemakmuran (*wealth*) dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hendro Sumarjo dengan perbedaan penambahan variabel dengan belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, betapa pentingnya karakteristik pemerintah daerah menjadi salah satu bahasan yang menarik dalam kajian akuntansi sektor publik sehingga dalam peneliti penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian: “Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kota kupang.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah peneltian diatas maka yang menjadi persoalan penelitiannya adalah sebagai berikut: Apakah Karakteristik Pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi NTT?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan dan penambahan pengembangan wawasan pengetahuan ekonomi, khususnya pemahaman mengenai Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah dan juga menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

Peneliti ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui atau mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang.